

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan belum meratanya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta beragam sumber daya ekonomi yang berperan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensional yang menuntut penanganan dari berbagai aspek pembangunan (Akbar et al., 2022).

Penanggulangan kemiskinan turut menjadi agenda pembangunan di tingkat global. Melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)*, masyarakat internasional menetapkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai pada 2030 (United Nations, 2015). Komitmen tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan bukan semata tanggung jawab tiap negara, melainkan juga bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan secara global.

Di Indonesia, tingkat kemiskinan masih menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional. Komitmen ini tecermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang menetapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 6,5–7,5

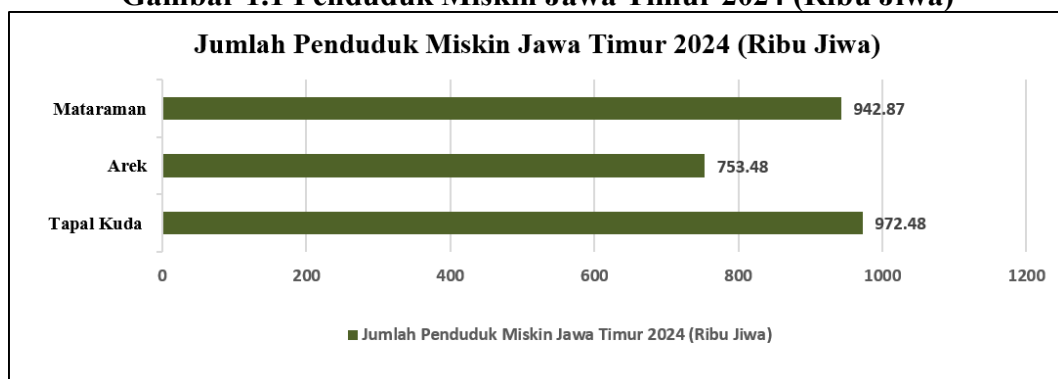
persen (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019). Target tersebut menandakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan, kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2024 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,06 juta jiwa (BPS, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan secara nasional belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kemiskinan di berbagai wilayah.

Salah satu provinsi yang masih menghadapi tantangan tersebut adalah Jawa Timur, yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, Jawa Timur menyumbang 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sehingga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2025). Namun, besarnya kontribusi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. BPS Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat kemiskinan masih berada pada angka 9,79 persen atau sekitar 3,98 juta jiwa pada Maret 2024 (BPS Jatim, 2024a). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum otomatis menghasilkan penurunan kemiskinan secara merata, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik pembangunan berbeda (Haerusman & Khoirudin, 2023).

Perbedaan tingkat kemiskinan antarkawasan menjadi salah satu karakteristik yang masih terlihat di Jawa Timur. Dalam konteks sosial budaya, wilayah Jawa Timur memiliki beberapa kawasan dengan karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah kawasan Arek yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Mojokerto, Jombang, serta sebagian Kediri dan Blitar. Sementara itu, pengaruh budaya Mataraman di Jawa Timur meliputi Ngawi, Magetan, Madiun, Nganjuk, serta sebagian Kediri, Blitar, dan Tuban (Sholihatin, 2013). Perbedaan karakteristik antarkawasan tersebut juga dapat dilihat dari kondisi kemiskinan yang terdapat di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, untuk melihat posisi kawasan Tapal Kuda dibandingkan dengan kawasan lainnya, penelitian ini membandingkan jumlah penduduk miskin pada kawasan Arek, Mataraman, dan Tapal Kuda.

Gambar 1.1 Penduduk Miskin Jawa Timur 2024 (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Jawa Timur (diolah, 2026)

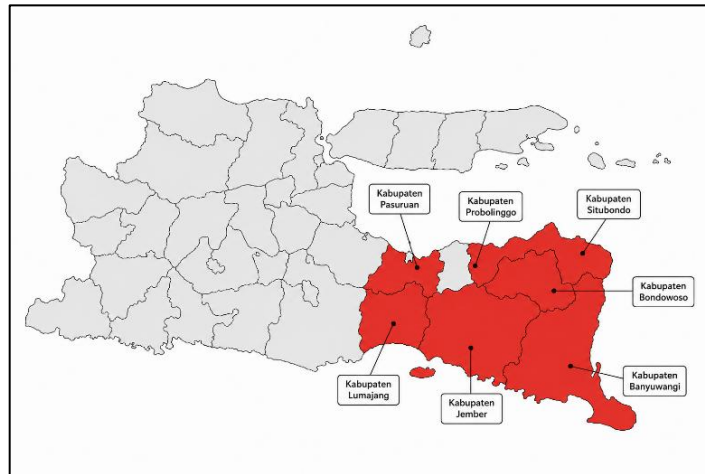
Berdasarkan Gambar 1.1, kawasan Tapal Kuda mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kawasan Arek dan Mataraman, yaitu sebesar 972,48 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di kawasan Arek mencapai 753,48 ribu jiwa dan kawasan Mataraman sebesar 942,87 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tidak tersebar secara merata antarkawasan. Tingginya jumlah penduduk miskin di kawasan Tapal Kuda menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi

salah satu permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian di kawasan tersebut. Selain itu, kondisi kemiskinan di dalam kawasan Tapal Kuda juga menunjukkan perbedaan antarkabupaten, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan variasi tingkat kemiskinan tersebut. Tingginya jumlah penduduk miskin di kawasan Tapal Kuda menjadi dasar bagi penelitian ini untuk memfokuskan kajian pada kawasan Tapal Kuda.

Kawasan Tapal Kuda terbentang mulai dari Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, hingga Banyuwangi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2025). Keistimewaan wilayah ini terletak pada tatanan sosial budayanya yang dikenal dengan istilah Pendalungan. Menurut Juliana & Suryandari (2025) identitas budaya ini merupakan wujud nyata dari proses persilangan atau akulturasi antara etnis Jawa dan Madura, yang hingga saat ini masih menjadi karakteristik utama kehidupan sosial masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi, sektor basis di kawasan Tapal Kuda masih banyak bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sesuai dengan karakter geografis wilayahnya. Ketergantungan pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian di kawasan Tapal Kuda memiliki karakteristik yang berbeda dengan beberapa wilayah lain di Jawa Timur yang lebih berkembang pada sektor industri dan jasa. Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut menyebabkan kawasan Tapal Kuda masih sering dipandang sebagai salah satu wilayah yang relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan lain di Jawa Timur (Winjaya & Taufiq, 2023).

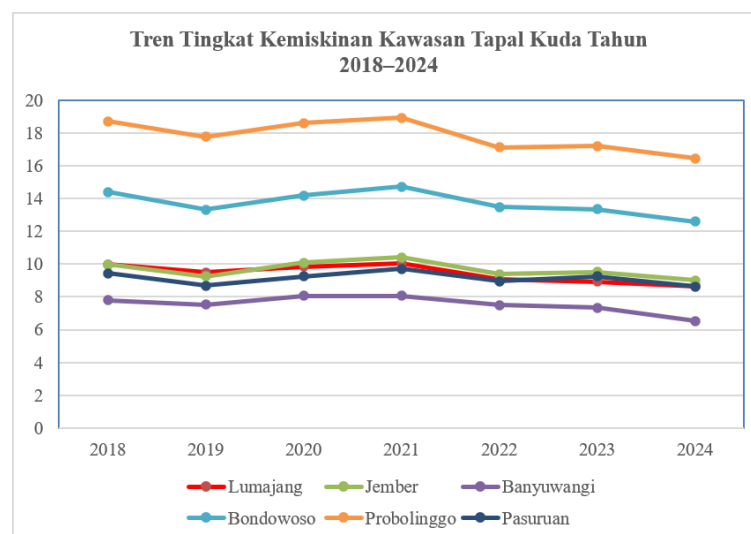
Gambar 1.2 Peta Kawasan Wilayah Tapal Kuda



Sumber: RPJMD 2025-2029 (diolah)

Meskipun berada dalam satu kawasan, kondisi kemiskinan antarkabupaten di Tapal Kuda menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2018–2024. Tingkat kemiskinan yang berbeda antarkabupaten menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di kawasan Tapal Kuda belum merata. Beberapa kabupaten masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Gambar 1.3 Tren Tingkat Kemiskinan Kawasan Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (%)



Sumber: BPS Jatim 2018-2024, (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten wilayah Tapal Kuda cenderung menurun sepanjang periode 2018–2024, tetapi penurunan tersebut berlangsung tidak merata antarkabupaten. Kabupaten Probolinggo secara konsisten menempati posisi kemiskinan tertinggi, diikuti oleh Bondowoso dan Situbondo yang juga bertahan pada level yang relatif tinggi. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Kabupaten Banyuwangi, yang konsisten mencatat angka kemiskinan terendah sekaligus mempertahankan tren penurunan paling stabil di kawasan ini. Pola tersebut menandakan bahwa kesenjangan kemiskinan di Tapal Kuda bukan sekadar akibat tekanan ekonomi jangka pendek, melainkan berkaitan dengan faktor struktural yang berbeda pada setiap kabupaten, sehingga diperlukan analisis terhadap kondisi ekonomi, pasar kerja, pendidikan, dan kesehatan sebagai determinan kemiskinan di wilayah ini.

Walaupun terletak di dalam wilayah yang sama, profil ekonomi dari masing-masing kabupaten di wilayah Tapal Kuda menunjukkan corak yang sangat variatif. Salah satu contohnya dapat dilihat di Kabupaten Pasuruan yang memiliki aktivitas industri cukup berkembang di Jawa Timur. Pertumbuhan ini didorong oleh eksistensi sentra-sentra industri dan kuatnya kontribusi sektor manufaktur atau pengolahan sebagai motor utama perekonomiannya (Latifah & Huda, 2023). Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Perkembangan sektor tersebut turut mendorong masuknya investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. (Ardiansyah & Sutedjo, 2019).

Berbeda dengan kedua kabupaten tersebut, fondasi ekonomi di Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo masih didominasi

oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi tersebut ditunjukkan melalui analisis *Location Quotient* yang menempatkan ketiga sektor tersebut sebagai sektor basis di sebagian besar wilayah Tapal Kuda, termasuk Lumajang, Jember, Situbondo, dan Bondowoso (Aliyadzi et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan pernyataan Bank Indonesia Perwakilan Jember yang menyebutkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian wilayah kerjanya, yang meliputi Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, terutama pada masa pandemi tahun 2020 (ANTARA news, 2020). Selain itu, penelitian Rizani (2017) juga menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jember didukung oleh kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan subsektor perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, dan perikanan sebagai penggerak utamanya.

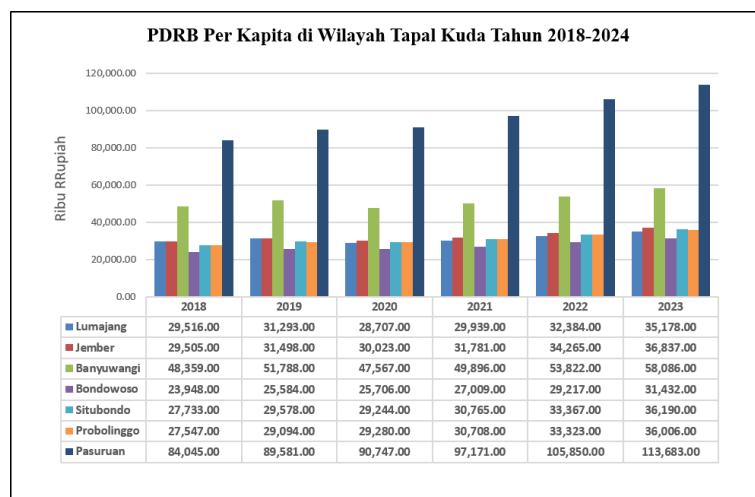
Tingkat kemiskinan yang bertahan pada posisi relatif tinggi dalam jangka waktu panjang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh guncangan ekonomi yang bersifat sementara, tetapi juga oleh hambatan struktural yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai *persistent poverty*, yaitu keadaan ketika individu, rumah tangga, atau wilayah tetap berada dalam kemiskinan dalam periode yang relatif lama (Hulme & McKay, 2008).

Salah satu pendekatan yang menjelaskan penyebab bertahannya kemiskinan adalah *poverty trap*. Kraay & McKenzie (2014) menjelaskan bahwa *poverty trap* merupakan kondisi ketika kemiskinan saat ini menjadi penyebab kemiskinan pada periode berikutnya karena adanya keterbatasan akumulasi modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan

produktif. Kemiskinan dalam kerangka ini tidak lagi dipandang semata sebagai akibat rendahnya pendapatan, melainkan sebagai hasil dari berbagai mekanisme yang saling memperkuat dan berlangsung dalam jangka panjang.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga mekanisme *poverty trap*, yaitu *savings trap*, *occupational trap*, dan *human capital trap*. Ketiga mekanisme tersebut direpresentasikan melalui variabel PDRB per kapita sebagai kapasitas ekonomi daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai kondisi pasar kerja, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator kualitas modal manusia.

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Wilayah Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Jatim 2018-2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4, PDRB per kapita di wilayah Tapal Kuda menunjukkan kesenjangan kapasitas ekonomi yang cukup besar antar kabupaten selama periode 2018–2024. Kabupaten Pasuruan secara konsisten memiliki PDRB per kapita jauh di atas kabupaten lain, dengan tren peningkatan yang paling tajam di kawasan ini. Banyuwangi menempati posisi kedua dengan selisih yang masih cukup lebar dari Pasuruan, sementara Jember, Lumajang, Situbondo, dan

Probolinggo berada pada kelompok menengah-bawah dengan capaian yang relatif berdekatan. Kabupaten Bondowoso konsisten berada pada posisi PDRB per kapita terendah sepanjang periode pengamatan.

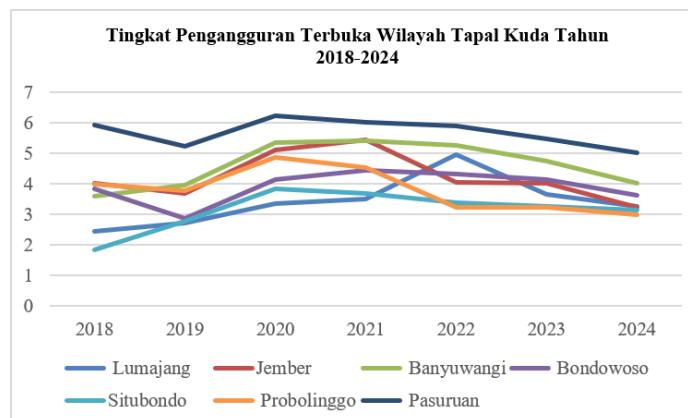
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan setiap kabupaten dalam menghasilkan pendapatan rata-rata masyarakat berkembang secara tidak merata. Kondisi ini juga sejalan dengan variasi tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda, di mana kabupaten dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding kabupaten dengan PDRB per kapita rendah. Fenomena tersebut menjadi dasar penggunaan PDRB per kapita sebagai salah satu determinan kemiskinan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, PDRB per kapita digunakan sebagai indikator kapasitas ekonomi daerah karena menunjukkan rata-rata kemampuan ekonomi yang dihasilkan per penduduk pada masing-masing kabupaten (Mulia, 2022).

Dalam perspektif *Poverty Trap*, mekanisme *Savings Trap* menjelaskan bahwa masyarakat dengan kapasitas ekonomi yang rendah cenderung memiliki kemampuan menabung, berinvestasi, dan mengakumulasi modal yang terbatas. Keterbatasan tersebut membuat produktivitas sulit meningkat, sehingga kemiskinan cenderung bertahan dalam jangka panjang (Kraay & McKenzie, 2014). PDRB per kapita dipilih dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan kapasitas ekonomi masyarakat pada tiap kabupaten. Kapasitas ekonomi tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi modal, sehingga PDRB per kapita dinilai tepat untuk merepresentasikan mekanisme *Savings Trap*.

Secara teoritis, tingginya kapasitas ekonomi suatu wilayah berbanding lurus dengan terbukanya peluang aktivitas ekonomi, peningkatan taraf pendapatan, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keterkaitan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap daerah. Sebagai perbandingan, penelitian Muslim et al., (2023) di Provinsi Sulawesi Tenggara justru menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara PDRB per kapita dengan populasi masyarakat miskin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah belum tentu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Adanya hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan masih memerlukan pembuktian empiris. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji hubungan tersebut pada wilayah Tapal Kuda yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam.

Kenaikan PDRB per kapita belum tentu berdampak pada penurunan kemiskinan apabila masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang memadai. Keterbatasan penyerapan tenaga kerja dapat membuat sebagian masyarakat tetap kesulitan memperoleh pendapatan yang memadai, meskipun kapasitas ekonomi daerah mengalami peningkatan. Kondisi pasar kerja kemudian menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam melihat tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (%)



Sumber: BPS Jatim, 2018-2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5, Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Tapal Kuda menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2018–2024. Hampir seluruh kabupaten mengalami lonjakan pengangguran pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19, kemudian berangsur menurun pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan tingkat pengangguran tersebut pada kenyataannya tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan dalam besaran yang sebanding, sehingga akses terhadap pekerjaan saja belum tentu cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara spesifik melihat besaran angkatan kerja yang belum terakomodasi oleh lapangan pekerjaan. Rasio pengangguran yang tinggi berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan sehingga meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan, yang berujung pada sulitnya pemenuhan kebutuhan primer. Di dalam kerangka *poverty trap*, keterisolasian warga dari akses pekerjaan berupah memadai ini disebut sebagai *occupational trap* (Kraay & McKenzie, 2014). Mengkaji fenomena jebakan pekerjaan (*occupational trap*) di wilayah Tapal Kuda menjadi sebuah urgensi tersendiri, terutama jika melihat dinamika tingkat pengangguran yang fluktuatif di masing-masing kabupaten selama periode pengamatan. Secara empiris,

kaitan antara angka pengangguran dan kemiskinan nyatanya tidak selalu menunjukkan pola yang searah. Asumsi ini didukung oleh hasil penelitian Said & Ferdhianzah (2025) di kawasan Malang Raya, yang membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio kemiskinan. Fakta empiris ini menyiratkan bahwa naik-turunnya angka pengangguran tidak secara otomatis memengaruhi kemiskinan penduduk, sehingga indikator ketenagakerjaan ini tidak dapat berdiri sendiri dan perlu disandingkan dengan determinan pendorong lainnya.

Kesempatan kerja yang tersedia belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan apabila pekerjaan tersebut tidak memberikan tingkat upah yang memadai. Karena itu, selain penyerapan tenaga kerja, besaran upah juga menjadi indikator penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan di wilayah Tapal Kuda. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) digunakan untuk melihat variasi standar upah formal yang berlaku pada masing-masing daerah.

Tabel 1.1 Upah Minimum Kab/Kota Wilayah Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Situbondo	1,616,903.62	1,763,267.65	1,913,321.73	1,938,321.73	1,942,750.77	2,137,025.85	2,172,287.00
Bondowoso	1,667,505.41	1,801,406.09	1,954,705.75	1,954,705.75	1,958,640.12	2,154,504.13	2,183,590.00
Lumajang	1,691,041.12	1,826,831.72	1,982,295.10	1,982,295.10	2,000,607.20	2,200,607.20	2,281,469.00
Banyuwangi	1,881,680.41	2,132,779.35	2,319,796.75	2,314,278.87	2,328,899.12	2,528,899.12	2,638,628.00
Jember	1,916,983.99	2,170,917.80	2,456,302.97	2,355,662.91	2,355,662.91	2,555,662.91	2,665,392.00
Probolinggo	2,042,900.06	2,306,944.93	2,503,265.94	2,553,265.95	2,553,265.95	2,753,265.95	2,806,955.00
Pasuruan	3,574,486.72	3,861,518.00	4,190,133.19	4,290,133.19	4,365,133.19	4,515,133.19	4,635,133.00

Sumber: BPS 2018-2024, (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Tapal Kuda terus mengalami peningkatan selama periode 2018–2024. Kabupaten Pasuruan secara konsisten memiliki UMK tertinggi karena didukung oleh aktivitas industri yang berkembang, sedangkan Bondowoso dan Situbondo masih berada

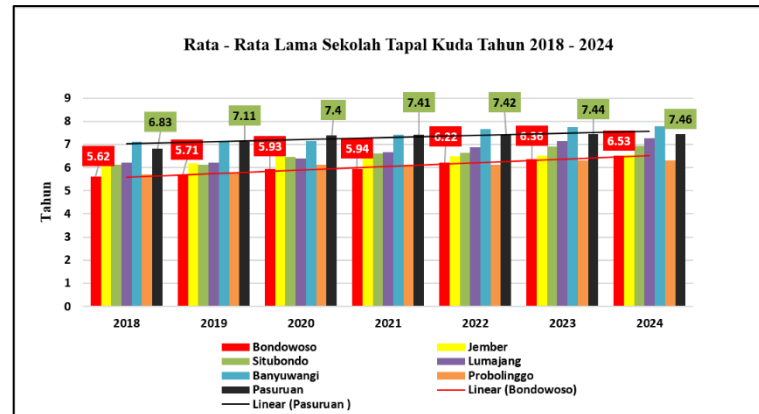
pada kelompok dengan UMK terendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pasar kerja formal antar kabupaten berkembang secara tidak merata.

Tingkat upah memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi pendapatan yang diterima pekerja, semakin besar pula peluang rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga risiko mengalami kemiskinan dapat berkurang. Namun, peningkatan upah tidak selalu memberikan dampak yang sama pada setiap daerah. Kondisi ini umumnya terjadi pada wilayah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Karakteristik tersebut masih ditemukan di beberapa kabupaten di kawasan Tapal Kuda. Meskipun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya berlaku bagi pekerja di sektor formal, variabel ini tetap digunakan dalam penelitian karena mencerminkan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten. Perbedaan besaran UMK juga mencerminkan karakteristik pasar kerja formal yang berlainan di setiap daerah, sehingga pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kondisi ekonomi dan pasar kerja yang telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Tapal Kuda tidak cukup dijelaskan hanya melalui kapasitas ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan masyarakat untuk keluar dari kondisi prasejahtera turut bertumpu pada kualitas sumber daya manusia, terutama pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini berperan membentuk kompetensi, menunjang produktivitas kerja, serta memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang layak secara finansial. Penelitian ini menetapkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan

Hidup (AHH) sebagai instrumen untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di wilayah Tapal Kuda.

Gambar 1.6 Tren Rata-rata Lama Sekolah di Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (Tahun)



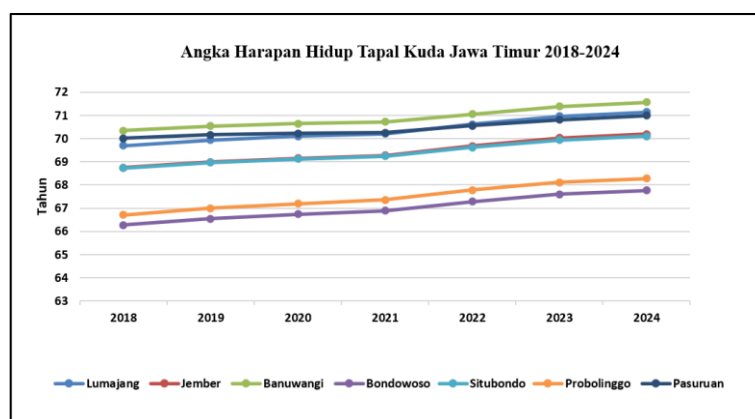
Sumber: BPS 2018-2024, (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.6, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Tapal Kuda menunjukkan tren peningkatan yang berlangsung lambat sepanjang periode 2018–2024. Sebagian besar kabupaten masih bertahan pada interval enam hingga tujuh tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk belum menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama secara utuh. Kabupaten Bondowoso konsisten mencatat capaian pendidikan terendah, sedangkan Pasuruan dan Banyuwangi berada pada posisi tertinggi meski selisihnya dengan kabupaten lain tidak terlalu lebar. Kesenjangan yang bertahan ini menjadi alasan digunakannya RLS dipilih sebagai indikator kualitas modal manusia karena mencerminkan akumulasi pendidikan yang dimiliki penduduk sebagai bekal memasuki pasar kerja.

Pendidikan yang lebih tinggi umumnya diiringi peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik (Mustakim et al., 2022). Susanto & Pangesti (2019) turut mengonfirmasi bahwa probabilitas jatuh miskin berbanding terbalik

dengan tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk. Dalam kerangka *human capital theory* (Becker, 1964; Schultz, 1961) pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi yang meningkatkan kapasitas produktif individu, sehingga rendahnya capaian pendidikan di sebagian kabupaten Tapal Kuda berpotensi memperlemah kemampuan penduduk keluar dari kemiskinan struktural.

Gambar 1.7 Tren Angka Harapan Hidup Tapal Kuda Tahun 2018-2024 (Tahun)



Sumber: BPS 2018-2024, (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.7, Angka Harapan Hidup (AHH) di wilayah Tapal Kuda meningkat secara bertahap pada seluruh kabupaten sepanjang periode 2018–2024. Meski tren perbaikan ini konsisten, perbedaan capaian kesehatan antarkabupaten tetap terlihat. Kabupaten Banyuwangi dan Pasuruan secara konsisten mencatat AHH tertinggi, sementara Bondowoso dan Probolinggo bertahan pada posisi terendah dengan selisih yang tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Kesenjangan yang bertahan ini menunjukkan bahwa perbaikan derajat kesehatan masyarakat belum berlangsung merata di seluruh kawasan, sehingga AHH digunakan sebagai indikator kualitas modal manusia dari dimensi kesehatan dalam penelitian ini.

Kondisi kesehatan yang baik merupakan modal dasar bagi individu untuk mempertahankan produktivitas kerja, meningkatkan kapasitas memperoleh pendapatan, serta memperbesar peluang keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang. Wau (2022) membuktikan bahwa peningkatan mutu modal manusia mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata, khususnya di kawasan tertinggal Indonesia. Sejalan dengan *human capital theory* (Becker, 1964; Schultz, 1961) kesehatan menjadi salah satu bentuk investasi pada diri manusia yang menentukan kapasitas kerja dan kemampuan penduduk memperoleh penghasilan yang layak. Ketimpangan capaian kesehatan di wilayah Tapal Kuda berpotensi turut menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarkabupaten di kawasan ini. Hubungan antara kualitas kesehatan dan kemiskinan tersebut juga tercermin dalam temuan empiris pada berbagai wilayah, termasuk penelitian yang dilakukan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

Salah satu penelitian yang membahas hubungan tersebut adalah penelitian Zahra & Wahed (2026) yang menganalisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada tujuh kabupaten di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur selama periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB per kapita dan UMK tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan masih dapat berbeda berdasarkan karakteristik wilayah dan variabel yang digunakan. Pamungkas et al. (2024) yang meneliti Kabupaten Jember menemukan bahwa PDRB dan RLS tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif dan

signifikan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Fajriah (2021) pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa PDRB, jumlah penduduk, TPT, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan UMR tidak berpengaruh signifikan.

Perbedaan hasil juga terlihat pada penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Imantria (2024) menggunakan data 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2022 dan menemukan bahwa pendapatan per kapita, RLS, dan AHH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, Oktavia et al. (2025) yang meneliti 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2021–2023 menemukan bahwa AHH dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Selain adanya perbedaan hasil penelitian, penelitian terdahulu umumnya masih menganalisis faktor ekonomi, ketenagakerjaan, maupun modal manusia sebagai variabel yang berdiri sendiri atau hanya mencakup sebagian dari dimensi tersebut. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana ketiga dimensi tersebut dapat saling berkaitan dalam mempertahankan kemiskinan dalam jangka panjang. Perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh PDRB per kapita, TPT, UMK, RLS, dan AHH pada berbagai wilayah dan periode penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan kelima variabel tersebut dengan tingkat kemiskinan masih belum konsisten. Meskipun demikian, terdapat gap penelitian dalam kajian kemiskinan, yaitu penelitian sebelumnya masih banyak menganalisis faktor ekonomi, ketenagakerjaan, dan modal manusia secara terpisah atau hanya menggunakan sebagian dari faktor tersebut. Pendekatan yang mengintegrasikan

ketiga dimensi tersebut dalam kerangka *poverty trap*, khususnya pada Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, masih terbatas.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan secara simultan tiga mekanisme *poverty trap*, yaitu *savings trap*, *occupational trap*, dan *human capital trap* dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan tingkat kemiskinan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara kapasitas ekonomi, kondisi pasar kerja, dan kualitas modal manusia dalam kaitannya dengan kemiskinan, sehingga tidak hanya melihat masing-masing faktor secara terpisah.

Kedua, penelitian ini menggunakan lima variabel yang mewakili ketiga mekanisme *poverty trap* tersebut secara simultan dalam satu model. PDRB per kapita digunakan sebagai representasi kapasitas ekonomi daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai representasi kondisi pasar kerja, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai representasi kualitas modal manusia. Penggunaan kelima variabel tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran yang lebih luas dalam menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan penelitian yang hanya menggunakan sebagian dari dimensi ekonomi, ketenagakerjaan, atau modal manusia.

Ketiga, penelitian ini menggunakan Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur sebagai konteks empiris penelitian yang mencakup tujuh kabupaten, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi selama periode 2018–2024. Wilayah tersebut memiliki karakteristik

ekonomi yang beragam, mulai dari Kabupaten Pasuruan yang memiliki aktivitas industri, Kabupaten Banyuwangi yang berkembang melalui sektor pariwisata, hingga beberapa kabupaten yang masih banyak ditopang oleh sektor pertanian. Perbedaan karakteristik tersebut memberikan ruang untuk mengkaji keterkaitan kapasitas ekonomi, kondisi pasar kerja, dan kualitas modal manusia dengan tingkat kemiskinan pada wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dalam satu kawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena empiris, kerangka teori, serta gap dan novelty yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur selama periode 2018–2024. Penelitian ini berjudul **"Determinan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur."**

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda?
3. Apakah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda?
4. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda?

5. Apakah Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.
4. Mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.
5. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.

1.4. Ruang Lingkup

Objek penelitian ini adalah Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang terdiri atas tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor industri, pariwisata, hingga pertanian, serta adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarkabupaten. Kondisi tersebut menjadikan Wilayah Tapal Kuda relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan dalam karakteristik wilayah yang heterogen.

Penelitian dilakukan pada periode 2018 hingga 2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk melihat perubahan tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Tahun 2018–2019 digunakan untuk menggambarkan kondisi sebelum pandemi, tahun 2020–2021 mencerminkan periode pandemi yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan pasar kerja, sedangkan tahun 2022–2024 digunakan untuk melihat kondisi pada masa pemulihan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang relevan.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, penelitian ini menggunakan enam variabel yang terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen. Tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen meliputi PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan tiga mekanisme *poverty trap*, yaitu *savings trap* yang direpresentasikan melalui PDRB per kapita, *occupational trap* yang dikaitkan dengan kondisi pasar kerja melalui TPT dan UMK, serta *human capital trap* yang direpresentasikan melalui RLS dan AHH.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada aspek keilmuan maupun implementasi kebijakan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Pelaksanaan penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena kemiskinan beserta faktor-faktor yang berkaitan dengannya di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Selain itu, proses penelitian juga menjadi media pembelajaran dalam penerapan metode data panel pada bidang ekonomi pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analitis dan keterampilan penelitian yang dimiliki.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi kajian-kajian yang membahas isu kemiskinan. Temuan penelitian diharapkan mampu memperkaya literatur yang ada serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian dengan wilayah, rentang waktu, metode analisis, maupun indikator yang berbeda.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi empiris yang berguna dalam mendukung perumusan strategi pengurangan kemiskinan di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Analisis yang dilakukan memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan tingkat

kemiskinan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, khususnya pada sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.